



SIARAN PERS

Untuk disiarkan segera

“Amandemen PP109/2012 Mendesak untuk Kendalikan Konsumsi Rokok di Masa Pandemi Covid-19”

Jakarta, 31 Maret 2021 – Hari ini, setahun sejak Keputusan Presiden menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah belum juga mengambil langkah signifikan dalam menekan konsumsi rokok di Indonesia. Padahal, berbagai studi telah menyebutkan korelasi erat antara konsumsi rokok dan Covid-19, meningkatkan risiko penularan dan memperberat komorbid pasien Covid-19. Meski tren kasus Covid-19 di Indonesia turun, namun kematian akibat Covid-19 Indonesia masih yang tertinggi di Asia Tenggara (<https://ourworldindata.org/covid-deaths>). Terkait hal ini, Komnas Pengendalian Tembakau, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menyampaikan pernyataannya dalam Konferensi Pers “Setahun Pandemi: Celah Regulasi yang Memperlambat Pemulihan COVID-19” sore ini.

Hingga 28 Maret 2021, Satgas Covid mencatat sebanyak 1.501.093 Kasus Terkonfirmasi (+5.008 Kasus), 123.694 Kasus Aktif (8,2% dari Terkonfirmasi), serta 40.581 Meninggal (2,7% dari Terkonfirmasi). Sejumlah 51% terkonfirmasi adalah perempuan, dan pada kelompok yang meninggal sebanyak 56,9% laki-laki dan 43,1% perempuan. Usia yang terkonfirmasi terbanyak berusia pada usia produktif 31-45 tahun 28,2% diikuti oleh usia 19-30 tahun sebanyak 25,2%. Sementara Kasus meninggal tertinggi ada di usia lebih dari 60 tahun sebanyak 48,1% dan usia selanjutnya adalah 46-59 tahun dengan persentase sebesar 36,4%.

Seperti yang kita ketahui, konsumsi rokok adalah faktor risiko utama penyakit-penyakit tidak menular mematikan, yang di antaranya ternyata merupakan penyakit-penyakit penyerta pasien covid -19 tertinggi, yaitu hipertensi, kardiovaskular, paru kronis, dan kanker, yakni hipertensi sebesar 50,4%, diabetes melitus 35,3%, penyakit jantung sebanyak 17,6%, penyakit paru kronis 6,2%, beserta kanker sebesar 1,2%. Pada diabetes melitus pun, rokok meningkatkan faktor risiko seseorang terkena penyakit Diabetes Mellitus Tipe 2. Zat adiktif nikotin dalam rokok dapat menyebabkan resistensi hormon insulin dan mengurangi respon pankreas untuk menghasilkan insulin.

Risikesdas 2018 menunjukkan, prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Risikesdas 2013, antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi. Prevalensi kanker naik dari 1,4% (Risikesdas 2013) menjadi 1,8% prevalensi stroke naik dari 7% menjadi 10,9% dan penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8%. Berdasarkan pemeriksaan gula darah, diabetes melitus naik dari 6,9% menjadi 8,5%; dan hasil pengukuran tekanan darah, hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup antara lain merokok. Sejak 2013, prevalensi merokok pada remaja (10-18 tahun) terus meningkat, yaitu 7,2% (Risikesdas 2013), 8,8% (Sirkesnas 2016), dan 9,1% (Risikesdas 2018).

Berbagai riset di berbagai negara di seluruh dunia telah membuktikan bahwa terdapat hubungan erat antara perilaku merokok yang memperberat risiko penularan Covid-19 dan penyakit penyertanya. Penelitian yang dilakukan Komnas Pengendalian Tembakau (2020) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (2021) menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan konsumsi rokok di masa pandemi COVID-19.

“Data perokok dan COVID-19 per provinsi di Indonesia menunjukkan adanya peluang tingginya jumlah perokok akan diikuti dengan tingginya kasus COVID-19. Jika dibandingkan dengan beberapa Negara lain di Asia Tenggara, Indonesia memiliki prevalensi perokok tertinggi diikuti dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi,” jelas DR. Dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FAPSR, FISR, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dalam konferensi pers.

Melihat kaitan antara perilaku merokok dan Covid-19, hendaknya penanganan Covid-19 di Indonesia juga memperhatikan pengendalian konsumsi rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik, yang saat ini tak terbendung di negeri kita. “Namun sayangnya, jangan sampai menjadi salah satu fokus bagian dari upaya penanganan Covid-19, pengendalian konsumsi rokok cenderung stagnan bahkan diabaikan. Untuk itu, YLKI mendesak Menkes agar segera memproses amandemen PP109/2012 untuk melindungi konsumen Indonesia,” ujar Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia seraya menyinggung amandemen Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang merupakan regulasi penting dalam pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia, yang tidak kunjung selesai proses revisinya.

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, mengungkapkan bahwa pengendalian konsumsi rokok saat ini mendesak dilakukan. “Kami percaya, Pak Menkes saat ini memiliki prioritas yang sangat baik yang lebih memilih pada upaya preventif kesehatan daripada kuratif. Karena itu, program vaksin yang sedang berlangsung harus dibarengi dengan penguatan regulasi kesehatan, yang di antaranya paling mendesak saat ini adalah revisi PP109/2012 untuk menekan masalah-masalah kuratif kesehatan yang lagi-lagi harus dilakukan di masa depan,” tegasnya.

----- Narahubung: sekretariat@komnaspt.or.id atau (021) 3917354.

Tentang Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli akan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin. Info: komnaspt.or.id

Tentang Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI):

Didirikan pada 1973, semula bernama Ikatan Dokter Paru Indonesia (IDPI) ini adalah organisasi profesi yang menghimpun seluruh dokter spesialis paru di Indonesia. Sejak berdirinya, telah menyelenggarakan kongres lima belas kali dan menjelang Kongres XVI-PDPI tahun 2021, tercatat 1239 dokter spesialis paru anggota PDPI dengan 29 cabang di seluruh Indonesia. Info: klikpdpi.com

Tentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI):

Merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Info: ylki.or.id